

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Jurnal:

A, Sumanto M, 2014, *Hubungan Industrial Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global*, CAPS, Yogyakarta.

Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Alkatiri, Zeffry, 2010, *Belajar Memahami HAM. Katalog*, Ruas, Jakarta.

Amin, H.M. Erham, Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I No. 1, November 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Asshidiqie, Jimmly, 2017, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Asyhadie, H. Zaeni, dkk, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dan Teori dan Praktek di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ayunita, Khelda, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Bahagijo, Sugeng, dkk, 1999, *Hak Asasi Manusia: Tanggungjawab Negara, Peran Institusi Nasional dan masyarakat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Bangun, Rikard, dkk, 1997, *Hak Asasi Dalam Tajuk*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Bambang, Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.

Cassese Antonio, 1994, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Daeng Naja H. R, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Djaali, dkk, 2003, *Hak Asasi Manusia. (suatu Tinjauan Teoritis dan aplikasi)*, Restu Agung, Jakarta.

Fanani, Ahmad Zaenal, 2006, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Liberty, Surabaya

Finck, Danielle E, , *Judicial Review: The United States Supreme Court Versus The German Constitutional Court*, 20 *B.C. Int'l & Comp. L. Rev.* 123, 1997, <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol20/iss1/5>

Lawrence Meil Friedman, *Law and Society; an Introduction*, (Prentice-Hall Foundation of Modern Sociology Series, Englewood, Cliffs, Stanford University, New Jersey, 1979) H. 7, Nur Rohim Yunus, Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif, *Supremasi Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2015, Fakultas Hukum UNiversitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, hlm 39, https://www.researchgate.net/publication/327069987_MENCIPTAKAN_BUDAYA_HUKUM_MASYARAKAT_INDONESIA_DALAM_DIMENSI_HUKUM_PROGRESIF, Diakses pada 11 Juli 2019.

Gonggong, Anhar, 1995, *Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, CV. Dwi Jaya Karya, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Hamzah, Anid Jur, 2012, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.

H Zaelani Ashyadie, dkk, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Hernawan, Ari, Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Mogok Kerja, *Mimbar Hukum*, volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.

Huda , Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Press UII, Yogyakarta.

Husni, Lalu, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartasapoetra, G, dkk, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.

Indriyati, Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Kanisius, Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006, *Potret Buram HAM Indonesia (Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Buletin Wacana HAM 2005)*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Perpustakaan Nasional:2016, *60 Tahun Jimmly Asshidique: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta

Latif, Abdul, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta,

Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 6 Nomor 1, April 2009.

Manulang, Sendjun H, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Marwan, Ali, 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang.

Matius Priyonegoro, 2017, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan*, Tesis, Universitas Airlangga.

Mohammad Agus Maulidi, Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 24 Oktober 2017

Morris L. Cohe, dkk, 1992, *Legal research*, West Publishing Company, St. Paul Minn, Paragraph 1.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir, 2014, *Gerakan Perlawanan Buruh. Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, Intrans Publishing, Malang.

Poedjawijatna, 1991, *Tahu dan Pengetahuan, Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, dkk, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Ratnaningsih, Erna, Asas Erga Ormes Dalam Mahkamah Konstitusi, *Rubric of faculty member*, Oktober 2017.

Rifai, Ahmad, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law system*, Pustaka Refleksi, Makasar.

S, Maria Farida Indriyati, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Kanisius, Jakarta.

Sari, Elsi Kartika, dkk, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi*, PT. Grasindo, Jakarta.

Saifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Soerjono Soekanto, dkk, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2004, *Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Theorodon B.V. Runtuwene. 2015. *Lex Administratum*, Vol III/No. 4 Juni/2015, *Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau dari Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali*.

Triyanto, Djoko, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta

Winarta, Frans H, Contempt of Court Sebagai Perisai Hakim, *Koran Sindo*, Kamis, 18 Juli 2019, 12.25, <https://nasional.sindonews.com/read/762523/18/contemp-of-court-sebagai-perisai-hakim-1374125102>, diakses pada 16 Juni 2019.

Nur Rohim Yunus, Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif, *Supremasi Hukum, Volume 11 Nomor 1, Januari 2015*.
https://www.researchgate.net/publication/327069987_MENCIPTAKAN_BUDAYA_HUKUM_MASYARAKAT_INDONESIA_DALAM_DIMENSI_HUKUM_PROGRESIF. Diakses pada 11 Juli 2019.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

Hakim Albana, 2016, Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Johny Pangaribuan, 2011, Pertanggungjawaban PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Penyelenggaraan Saran Perkeretaapian Terhadap Kecelakaan Kereta Api (Studi Kasus), *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

Lilik Kurniawan, 2016, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan dalam Mewujudkan Prinsip Due Process of law, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mega Puspita Saraswati, 2018, Implikasi Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Sistem, *Tesis*,

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Ma'ruf, 2018, Aspek Kepastian Hukum dalam Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Okta Heriawan, 2018, Implikasi Pertimbangan Hukum dalam Amar Putusan yang Menyatakan Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Tidak Dapat Diterima Terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ratih Andrawina Suminar, 2016, Penerapan Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Serta Implikasinya terhadap Dinamisasi Hukum dan Masyarakat, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

R. Yoes Hartyarso, 2010, *Analisis Yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Kepailitan (Studi Kasus CV Sar Pati Idaman)*, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wafdah Zikra Yuniarsyah, 2017, Kualifikasi Perbuatan Tidak Patuh Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Sebagai Salah Satu Contemp of Court, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Internet:

Devi Agnesia “*Hukum dan Norma*”
https://www.academia.edu/9193626/SOAL_DAN_JAWABAN diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

Mahfud MD, *Penegakan Keadilan di Pengadilan*,
<http://www.mahfudmd.co/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=26&PHPSESSID=lpqp110odneljp8kt240iflsj7>, diakses pada 11 Juni 2009.

Nay, Jimly: Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Perlu Eksekusi, 28 Agustus 2003, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho18702/jimly-putusan-mahkamah-konstitusi-tidak-perlu-eksekusi> diakses pada tanggal 9 April 2019

Taufik Rohman. Pengertian Ketenagakerjaan dan Pengangguran <https://www.katapengertian.com/2016/01/pengertian-ketenagakerjaan-dan.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019.

Sidiq, Budaya Politik Parokial: Pengertian, Ciri-ciri dan contohnya, November 2018, <https://www.google.com/amp/sosiologis.com/budaya-politik-parokial/amp>. Diakses pada Tanggal 11 Juli 2019.

Guru Geografi, Budaya Politik Parokial, Subjek dan Partisipan, 7 Agustus 2017, <https://www.gurugeografi.id/2017/08/budaya-politik-parokial-subjek-dan.html?m=1>. Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perburuhan (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1957, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1970, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 1999, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Nomor 150 Tahun 2004, Penjelasan dalam Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011, penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Nomor 82 Tahun 2011 Penjelasan dalam tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 5234)

E. Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Perihal pengujian Pasal 28 C ayat 2, 28 D ayat (1), 28 D ayat (2), 28 I ayat (4), 28 J ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Pasal

153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 14 Desember 2017.